

**ALOKASI JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JENIS KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN PNS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				JUMLAH FORMASI	PENEMPATAN
			PUTRA/ PUTRI LULUSAN TERBAIK (10%)	DISABILITAS (2%)	PUTRA/ PUTRI PAPUA	UMUM		
			2	1	1	16	20	
1	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 HUKUM; S-2 HUKUM DAN PEMBANGUNAN; S-2 HUKUM AGRARIA DAN PERTANAHAN; S-2 HUKUM PUBLIK	1		1	1	3	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 ILMU AKUNTANSI	1			1	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
3	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 STATISTIKA TERAPAN				3	3	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
4	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 MANAJEMEN BENCANA; S-2 MITIGASI BENCANA				2	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
5	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 INOVASI SISTEM DAN TEKNOLOGI; MAGISTER TERAPAN REKAYASA TEKNOLOGI INFORMASI				3	3	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
6	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 BAHASA INGGRIS		1		2	3	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
7	ASISTEN AHLI - DOSEN	S-2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI; S-2 PENDIDIKAN DIGITAL				2	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
8	ASISTEN AHLI - DOSEN	MAGISTER TERAPAN REKAYASA KESELAMATAN DAN RESIKO				2	2	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

**ALOKASI JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JENIS KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN PPPK TENAGA TEKNIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	UNIT PENEMPATAN
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		
			2	68	15	85	
1	AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 ILMU KOMPUTER		1		1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
		S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN		1		1	INSPEKTORAT JENDERAL
2	AHLI MUDA - STATISTISI	S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA			1	1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
3	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM		1	1	2	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
				3	1	4	SEKRETARIAT JENDERAL
			1			1	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	UNIT PENEMPATAN
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		
4	AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	S-1 PSIKOLOGI		4	1	5	SEKRETARIAT JENDERAL
5	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS; S-1 SASTRA INGGRIS; S-1 BAHASA INGGRIS	1			1	SEKRETARIAT JENDERAL
		S-1 SASTRA INGGRIS; S-1 BAHASA INGGRIS; S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS; S-1 PENDIDIKAN SASTRA INGGRIS		3	2	5	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
6	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI		1		1	BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG
				1		1	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA DI MALANG
				2		2	DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				1	1	2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				1		1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				1		1	PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA
				1		1	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
				1		1	IPDN KAMPUS PAPUA
				2		2	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	UNIT PENEMPATAN
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		
				1		1	INSPEKTORAT JENDERAL
				4	1	5	SEKRETARIAT JENDERAL
		S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 SISTEM KOMPUTER		2		2	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
7	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 EKONOMI; S-1 AKUNTANSI; S-1 PERENCANAAN WILAYAH		4	1	5	SEKRETARIAT JENDERAL
		D-IV TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI; D-IV SISTEM INFORMASI; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN; D-IV TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER		2		2	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	UNIT PENEMPATAN
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		
8	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 INFORMATIKA; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA; D-IV SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN; D-IV TEKNIK KOMPUTER		9	2	11	SEKRETARIAT JENDERAL
		S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN		1		1	INSPEKTORAT JENDERAL
		S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER		4		4	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	UNIT PENEMPATAN
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		
		S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI; D-IV SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA; D-IV TEKNIK KOMPUTER; D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN		3	2	5	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
9	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA		2	1	3	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
				2		2	SEKRETARIAT JENDERAL
		S-1 STATISTIK; S-1 STATISTIKA; S-1 STATISTIKA DAN SAINS DATA; S-1 MATEMATIKA		2		2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				2		2	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
				2		2	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	UNIT PENEMPATAN
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		
10	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	S-1 TEKNIK GEODESI; S-1 TEKNIK GEOMATIKA; S-1 GEOGRAFI; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH		4	1	5	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

**ALOKASI JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JENIS KEBUTUHAN SELEKSI PENGADAAN PPPK TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	PENEMPATAN	
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		KLINIK	UNIT KERJA
			1	38	9	48		
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER		1		1	KLINIK PRATAMA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG
				1		1	KLINIK PRATAMA POLIKLINIK DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
				1		1	KLINIK PRATAMA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SEKRETARIAT JENDERAL
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN JATINANGOR	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN CILANDAK JAKARTA	IPDN KAMPUS JAKARTA
				1		1	KLINIK PRATAMA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
				1		1	KLINIK PRATAMA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				1		1	KLINIK PRATAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN/BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	PENEMPATAN	
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		KLINIK	UNIT KERJA
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER			1	1	KLINIK PRATAMA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG
					1	1	KLINIK PRATAMA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SEKRETARIAT JENDERAL
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN JATINANGOR	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN CILANDAK JAKARTA	IPDN KAMPUS JAKARTA
				1		1	KLINIK PRATAMA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI		1		1	KLINIK PRATAMA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SEKRETARIAT JENDERAL
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT
					1	1	KLINIK PRATAMA IPDN CILANDAK JAKARTA	IPDN KAMPUS JAKARTA
				1		1	KLINIK PRATAMA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
4	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS; D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN		1		1	KLINIK PRATAMA POLIKLINIK DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
				2	1	3	KLINIK PRATAMA IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT
				2	1	3	KLINIK PRATAMA IPDN JATINANGOR	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN CILANDAK JAKARTA	IPDN KAMPUS JAKARTA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	PENEMPATAN	
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		KLINIK	UNIT KERJA
5	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-IV/SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN KESEHATAN GIGI; D-IV/SARJANA TERAPAN TERAPIS GIGI DAN MULUT		1		1	KLINIK PRATAMA POLIKLINIK DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN CILANDAK JAKARTA	IPDN KAMPUS JAKARTA
				1		1	KLINIK PRATAMA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
6	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI		1		1	KLINIK PRATAMA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SEKRETARIAT JENDERAL
			1		1	2	KLINIK PRATAMA IPDN JATINANGOR	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
				1		1	KLINIK PRATAMA IPDN CILANDAK JAKARTA	IPDN KAMPUS JAKARTA
7	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN		1	1	2	KLINIK PRATAMA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG
				1		1	KLINIK PRATAMA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SEKRETARIAT JENDERAL
				2		2	KLINIK PRATAMA IPDN JATINANGOR	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
8	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN; D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK		1		1	KLINIK PRATAMA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI	SEKRETARIAT JENDERAL
				1	1	2	KLINIK PRATAMA IPDN JATINANGOR	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
				1		1	KLINIK PRATAMA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN			JUMLAH	PENEMPATAN	
			DISABILITAS (2%)	NON ASN (80%)	UMUM		KLINIK	UNIT KERJA
9	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III KEPERAWATAN GIGI; D-III KESEHATAN GIGI; D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT		1	1	2	KLINIK PRATAMA IPDN JATINANGOR	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
				1		1	KLINIK PRATAMA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTRIAN DALAM NEGERI	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				1		1	KLINIK PRATAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN/BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI